



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS SEBELAS MARET

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SLAMET SUBIYANTORO**
2. Jabatan : **WAKIL DEKAN BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI**
3. NHK : **755067**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 650.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 10 m2/10 m2 di KAB / KOTA
KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
2. Tanah Seluas 2575 m2 di KAB / KOTA KLATEN, WARISAN Rp.
200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 98.200.000

1. MOTOR, HONDA METIK Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
8.500.000
2. MOTOR, HONDA BEBEK Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
6.400.000
3. MOTOR, HONDA METIK Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
3.600.000
4. MOTOR, HONDA KARISMA Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp.
2.700.000
5. MOBIL, NISSAN LIVINA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
77.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 175.307.046

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 924.007.046



III. HUTANG

Rp.

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

924.007.046

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.